

Kertas Diskusi & Advokasi # 3  
(Discussion & Advocation Papers # 3)

The Tamarind Economy:  
Fondasi Ketahanan Pangan NTT?



Left ©Motherherbs.com. Right ©Kerala.com. Lingkaran Merah: biji asam

Jonatan Lassa

Desember 2007

Kertas diskusi ini pertama kali ditulis untuk opini Pos Kupang 1 October 2007. Disadur ulang secara apa adanya oleh penulis ke dalam format kertas diskusi dan advokasi dengan penambahan informasi pada potensi biji asam dalam perkembangan ekonomi nasional dan perdagangan biji asam.

Institute of Indonesia Tenggara Studies  
(East Nusa Tenggara Studies)  
©IITS Publications (Open Sources)

**About Institute of Indonesia Tenggara Studies (NTT Studies)  
©IITS Publications (Open Sources)**

**Kertas Diskusi & Advokasi (Discussion & Advocation Papers)**

We publish (either in both Bahasa and English) regularly scientific Discussion Papers on development issues from East Nusa Tenggara Province, with regional focus such as West Timor, Sumba, Flores, Lembata, Alor, Rote and Sabu. The papers are reviewed. The format is minimum 1500 words (1.5 space, Times New Romans 12).

Kami menerima secara reguler Kertas Diskusi & Advocacy tentang berbagai issue pembangunan (pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, pendidikan, dsb.), ilmu pengetahuan, filsafat dan technology. Semua Kertas akan direview. Permohonan ISSN akan dilakukan segera. Format standar adalah minimal 1500 kata (1.5 spasi, Times New Romans 12).

**PREVIOUS PUBLICATIONS:**

**Working Papers 1 (November 2007). Leonard Simanjuntak** (Penuhi Dulu Rumah Bulatmu Dengan Jagung: Meletakkan Sendi- Sendi Keamanan Pangan Dalam Perjuangan Melawan Perubahan Paksa). 48 Pages.

**Working Papers 2 (November 2007). Lexand Ofong** (Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di NTT). 27 Pages.

**Working Papers 3 (December 2007). Agustinus Bandur.** “A Review of Developments in School-Based Management in Indonesia”. 30 pages.

**Kertas Diskusi & Advokasi 1 (Desember 2007). Jonatan Lassa** “ Menuju Kampus Sebagai Basis Masyarakat Membaca”.

**Kertas Diskusi & Advokasi 2 (Desember 2007) Novita Lau and Danny Stamp A.** “Ritual Ceremony: Grand Opening a New Traditional House in Tamah, Central Pantar, Alor, NTT.

# The Tamarind Economy: Fondasi Ketahanan Pangan NTT?

Oleh Jonatan Lassa\*

---

## Pendahuluan.

POS Kupang 14 September 2007 memberitakan masyarakat di Sikka mengeluh terhadap harga asam yang menurun ke level Rp 1.500,00 dari sebelumnya bertengger di level Rp 2.000,00-an. Harian Kompas 28 September 2007 memberitakan harga asam dengan level Rp 1.500,00 di TTU mampu memberikan cadangan cash yang ditukarkan kepada pangan bisa bertahan selama 2-3 bulan.

Apa artinya kedua berita di atas bagi strategi pengentasan kemiskinan dan kelaparan, dan dalam kaitan yang lebih luas, apa artinya bagi ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan di NTT?

Studi dan penelitian berkaitan dengan pangan di NTT khususnya Timor Barat (Lassa 2003 dan Barbiche & Geraets 2007, Suharyo et. al. 2007), menunjukkan bahwa kontribusi asam terhadap ekonomi pedesaan di TTS cukup meyakinkan. Laporan Penelitian SMERU (Oleh Suharyo et. al. 2007, berjudul "Iklim Usaha di Provinsi NTT: Kasus Perdagangan Hasil Pertanian di Timor Barat")<sup>1</sup>, dikatakan bahwa "Hampir semua warga desa menjual asam. Dalam setahun volume asam yang dijual masyarakat desa ini rata-rata mencapai 30 ton sehingga diperkirakan penerimaan desa dalam setahun dari pungutan tersebut mencapai sekitar Rp1.500.000, 00".

Penelitian penulis di Desa Toineke tahun 2002 menunjukkan bahwa total penjualan asam yang tercatat adalah 260 ton (setara dengan Rp 260 juta pada bulan yang sama).

Sedangkan hasil penjualan 'kapuk' tahun 2002 yang tercatat di desa yang sama 40 ton (setara dengan Rp 40 juta). Total 300 juta yang terdistribusikan kepada lebih dari 1.500 penduduk di Desa Toineke dari dua komoditas yang 'tidak penting' di mata penguasa.

Desa yang sama dinyatakan sebagai tahun kelaparan oleh Pemda TTS (PK 23/09-2002) yang kemudian dibarengi oleh penilaian kondisi darurat dua LSM Internasional yang

---

<sup>1</sup> See: [http://www.smeru.or.id/report/research/nttbusiness/nttbusiness\\_eng.pdf](http://www.smeru.or.id/report/research/nttbusiness/nttbusiness_eng.pdf) (accessed on July 2007)

sekadar menjustifikasi 'bantuan beras' diperlukan dan dijawab juga oleh bantuan karitatif WFP di berbagai desa di TTS.

Fenomena di atas sedikit menjelaskan mengapa tujuan mulia para donor dan lembaga internasional dan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan kelaparan (melalui slogan-slogan MDGs) demi peningkatan ketahanan pangan di NTT selalu gagal dalam 30 tahun terakhir di NTT.

Karakter dasar lembaga pemerintahan dan berbagai LSM internasional di NTT seperti WFP dalam 30 tahun di NTT terakhir (waktu yang relatif panjang), terus terjebak dan menjebak diri melakukan pendekatan jangka pendek dan karitatif. Intervensi terhadap ketahanan pangan di NTT kerap terjebak pada nafsu proyek yang mau melihat hasilnya 'sesegera mungkin'. Nafsu akuntabilitas egosentrik terhadap 'funders' tidak akan menghasilkan fondasi dasar yang kokoh terhadap ketahanan pangan di NTT.

Sangat disayangkan. Ekonomi asam (tamarind economy) jarang menjadi pembahasan serius ketika para aktor pembuat kebijakan pembangunan pada lingkaran inti (pemerintah, DPRD, Bappeda, instansi sektoral terkait, LSM, donor maupun para akademisi universitas lokal seperti Undana) di NTT membicarakan strategi pengentasan kemiskinan, mitigasi kekeringan dan kelaparan, maupun ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan.

Asam (tamarind) oleh ekonom mainstream, pengambil kebijakan (Pemerintah & LSM) dan para aktor pembangunan dalam arti luas masih memandang asam sebagai komoditas sampingan dan bijinya identik dengan indikator kelaparan. Sedangkan rakyat pedesaan NTT telah sangat lama bergantung pada komoditas asam sebagai penopang penghidupannya, sebuah mekanisme bertahan yang bertahan tanpa mampu dibaca oleh kaum ahli pembangunan. Suatu aset sumber daya alam 'sampingan' yang tidak bisa dikesampingkan.

Pertanda 'verbalisme' menghantui para pengambil kebijakan pembangunan pedesaan di NTT? Pertanda adagium 'memulai dari apa yang ada' dari Tiga Batu Tungku penguasa NTT saat ini tidak dimengerti para bupati dan para anggota DPRD yang terhormat yang terus menuntut naik gaji? Dan khususnya buat LSM/INGOs dan lembaga-lembaga PBB,

seperti WFP yang karitatif dan jangka pendek, sesungguhnya ketagihan dengan proyek kemiskinan dan kelaparan di NTT?

Tulisan ini menantang para pengambil kebijakan untuk melihat keindahan dan kekuatan asam sebagai komoditas hutan non kayu (NTFP) yang sesungguhnya merupakan penopang utama berbagai komunitas di NTT, karenanya dibutuhkan instrument penguatan yang khusus dan berkelanjutan.

**Box 1. Fungsi Biji Asam (Sumber Kompas Cetak 18 Juni 2007<sup>2</sup> & Sebagainya)**

Selain itu, ditemukan manfaat biji buah asam untuk bahan baku pengental cetak tekstil. Di Nusa Tenggara Timur terdapat potensi sebanyak 6.000 ton biji asam per tahun Kompas memperkirakan Di Nusa Tenggara Timur terdapat potensi sebanyak 6.000 ton biji asam per tahun. Permintaan industri asal Korea Selatan mencapai 4 Ton pertahun namun biji asam hasil proses yang tersedia tidak lebih dari Rp. 500 kg.

Dalam tradisi budaya Jawa, biji asam memiliki banyak kasiat terutama untuk pencegahan diare.

Bila dikelola secara bijak dengan pemahaman atas kesempatan dan permintaan pasar, biji asam tidak harus hanya dimanfaatkan untuk makanan babi di pasar-pasar kampung di TTS. Sebaliknya, bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih luas.

Tetapi itu berarti diperlukan instrument yang menyeimbangkan kepentingan regenerasi pohon dan hutan asam yang multifungsi (ekonomis dan ekologis). Permintaan atas biji asam yang semakin tinggi hendaknya dibarengi dengan konservasi yang memadai.

Berbagai inisiatif di kampung-kampung seperti desa Toineke (Sumber PMPB Kupang – personal komunikasi, dan data PRA FKPB Kupang 2000) dan juga di Desa Oe' Ue (Sumber, kontak person di desa Oe' Ue) di Amanuban Tengah TTS, ada inisiatif lokal dari pihak desa dan gereja dalam konservasi pohon asam yang dilakukan secara reguler.

**Kerentanan NTT jangka panjang**

Konservasi pohon asam, yang dapat hidup lebih dari 200-an tahun, sesungguhnya tidak dilakukan secara sadar oleh masyarakat NTT yang menikmati keuntungan ekonomis dan penghidupan dari asam (tamarind). Data pohon asam tidak diketahui secara pasti, tetapi

<sup>2</sup> <http://kompas.com/kompas-cetak/0706/18/Jabar/23107.htm> (accessed July 2007)

data anecdotal sedikitnya menunjukkan lebih dari 2 juta pohon asam di NTT. Dibutuhkan penelitian lanjutan, tentunya untuk membuktikan salah atau benar.

Tidak seperti 'ekonomi kemiri' di Kabupaten Alor, ekonomi asam di Timor Barat tidak ditopang oleh kebijakan yang memadai. Asam hanya sekadar bagian dari hasil hutan non kayu (NTFP) yang signifikansi kontribusinya terhadap pembangunan dan ketahanan pangan tidak dihitung secara memadai.

Masalahnya adalah bahwa menurunnya populasi pohon asam di Timor Barat belum dirasakan sebagai masalah serius terhadap ketahanan pangan masyarakat. Salah satu risiko saat ini adalah bahwa harga biji asam bisa mencapai Rp 1.000,00 per kg di Pasar Inpres Soe pada musim tertentu.

Biji asam mulai menjadi favorit sumber pakan ternak akibat melonjaknya harga jagung yang mencapai rata-rata Rp 3.500-4.000 per kg. Ancaman terhadap konservasi asam mulai menjadi kenyataan dalam beberapa tahun ke depan, karena biasanya biji asam dibuang ke hutan agar tumbuh sendiri.

Tekanan pasar lokal yang di satu sisi menguntungkan secara ekonomis tetapi di lain sisi merugikan secara konservasi, secara jangka panjang tidak berkelanjutan. Kenyataan ini menuntut para pengambil kebijakan mengambil peran fasilitasi dalam mengembangkan ekonomi asam secara berkelanjutan, yang disertai dengan penguatan komoditas NTFP lainnya demi penguatan ketahanan pangan berkelanjutan di Timor Barat.

Saran penulis adalah bahwa strategi pengembangan NTFP seperti asam ini perlu ditopang oleh studi distribusi asam (dalam GIS mapping), studi spasial distribusi manfaat asam, ruang perbaikan konservasi NTFP, kesadaran masyarakat, serta konservasi asam dan komoditas NTFP lainnya berbasis masyarakat demi terciptanya ketahanan pangan berkelanjutan di Timor Barat.

### **Pengelolaan Rantai Asam**

Pemerintah daerah sesungguhnya merupakan penghambat utama dalam pengembangan ekonomi asam di NTT. Bila ditelusuri pengelolaan rantai usaha asam (tamarind chain

analysis), pengusaha pengumpul asam di Kupang dan Atambua serta 'middle men' tidak bisa disalahkan seratus persen untuk masalah harga asam yang tidak adil.

Laporan SMERU 2007 menyebutkan bahwa pengusaha diperhadapkan pada posisi yang sulit karena harus melayani urusan sembilan proses administrasi yang melelahkan dari tingkat desa hingga proses mengantar pulaukan: (1) Surat Permohonan Penerbitan SKSHH, (2) Surat Pernyataan dari Pemohon, (3) Daftar Hasil Hutan untuk Hasil Hutan Nonkayu, (4) Daftar Timbangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, (5) Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, (6) Pemberitahuan Impor Barang (PIB), (7) Lembar Lanjutan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), (8) Tanda Terima Sumbangan Pihak Ketiga dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota (9) Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor (Bea Masuk, Jasa Pekerja, PPN Impor, PPh (Pasal 22).

Ke sembilan proses di atas bersifat formal. Belum termasuk pemerasan yang dilakukan oknum polisi pada pos-pos penjagaan. Analisis rantai asam sederhananya adalah sebuah tracking (penelusuran) dari faktor input (konservasi dan produksi) di hulu hingga pada tingkat hilir (pengelolaan paska panen hingga pemasaran akhir).

Pemerintah NTT belum berfungsi secara optimal dalam tata kelola (good governance) rantai asam, dan secara egois hanya terjebak dalam nafsu pungutan tanpa memberikan jasa layanan good governance yang kelihatan. Laporan Suharyo et. al. 2007 menyebutkan tiga hal penting yang patut diperhatikan. Pertama, adanya upaya Pemda NTT untuk mengubah bentuk pungutan menjadi sumbangan pihak ketiga atau biaya administrasi dengan tujuan menghindari peraturan Pemerintah Pusat yang membatasi jumlah pungutan. Kedua, bahwa dampak pungutan resmi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) relatif sangat kecil, akan tetapi bisa memicu timbulnya pungutan tidak resmi (pungli).

Masalah Ketiga (p. ii) bahwa petani produsen umumnya memiliki skala usaha yang kecil dengan posisi tawar yang rendah, harga jual masih ditentukan oleh beberapa pedagang besar antarpulau sehingga terbentuk struktur pasar monopsoni alamiah (yakni keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas).

Jawaban terhadap ketiga masalah di atas hanya bisa terjadi kalau pemegang mandat kekuasaan rakyat yang bernama pemerintah mampu berbenah untuk menjalankan mandat tata kelola pemerintahan di sektor pembangunan NTFPs khususnya dalam tulisan ini adalah komoditas asam, menuju ekonomi asam yang mampu menjadi penopang ketahanan pangan di NTT.

Manfaat asam bersifat ganda. Dari Box 1 disimpulkan bahwa manfaat asam adalah untuk kepentingan industri tekstil, tetapi juga bagian dari komoditas *herbal*. Kulit asam juga memiliki fungsi *herbal* yang dikenal secara tradisional baik di Timor maupun di Jawa. Dagingnya juga memiliki sekali banyak fungsi. Sedangkan pohonnya berfungsi untuk kayu api. Keindahan asam dalam kehidupan masyarakat NTT ini harus dilihat dengan kesadaran kritis yang memberikan signal bagi lahirnya kebijakan yang mendukung ekonomi asam di NTT.

\*Kandidat Doktor (PhD) Kajian Disaster Governance, University of Bonn, Bonn, Germany